

PERSEPSI PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN GURU TERHADAP PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR DAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI SLTP BERPERSPEKTIF KESETARAAN *GENDER*

THE PERCEPTION OF POLICY MAKERS AND TEACHERS ABOUT DEVELOPING GENDER-EQUALITY-PERSPECTIVE MODELS OF BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TEACHING AND LEARNING MATERIAL IN SLTP

*Markhamah**, *Sarwiji Suwandi***, dan *Sudirdjo****

* FKIP - Universitas Muhammadiyah Surakarta

** Universitas Sebelas Maret Surakarta

*** Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The study aims at describing the perception of the headmasters and policy makers about developing gender-equality-perspective models of teaching and learning material of Bahasa and Sastra Indonesia in junior high schools. The data-collecting methods are questionnaire, observation, and interview. The data-analyzing methods include quantitative and qualitative. The outcome of the study shows that the perception of the teachers and headmasters as the decision makers are mostly positive, implying that such kind of model is needed, innovative, suitable with the competency-based curriculum demand and government program, clear, simple, and easy to apply, and as a challenging model. The positive perception is also indicated by the agreement of the headmasters as well as the decision makers that the model is interesting and proper. The model may give ways of creating gender justice in the society.

Kata kunci: *persepsi, model materi ajar, model pembelajaran, dan kesetaraan gender*

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. Perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia pada suatu negara sangat bergantung

pada hasil pendidikan dari bangsa yang bersangkutan. Jika pendidikannya lemah, akan lemah dan tertinggal juga sumber daya manusia pada negara itu. Pendidikan dapat mengarahkan perjalanan hidup suatu bangsa. Pendidikan adalah cara yang mendasar dalam perkembangan dan reformasi sosial (Tilaar, 1999).

Pendidikan nasional merupakan sarana untuk mencapai cita-cita nasional. Pendidikan nasional dituntut menghasilkan pelaku-pelaku yang akan mewujudkan cita-cita nasional. Tanpa pendidikan yang baik cita-cita kehidupan bersama tidak dapat terwujud dengan baik. Untuk mencapai pendidikan yang baik, menurut Tilaar (1999), diperlukan reformasi pendidikan nasional.

Reformasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan visi reformasi, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas ialah suatu masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maju, mandiri, dan berbudaya (Tilaar, 1999).

Pendidikan hendaknya melihat manusia secara keseluruhan. Seorang spesialis, dia harus dilengkapi pengetahuan mengenai totalitas kehidupan agar pengetahuannya itu bermanfaat bagi kehidupannya sendiri maupun bagi kehidupan umat manusia lainnya. Sebaliknya, pendidikan manusia seutuhnya harus dilengkapi dengan spesialisasi sesuai dengan potensinya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia yang utuh, kemudian dilengkapi dengan pengembangan khususnya (Tilaar, 1999).

Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, di samping bertanggung jawab, berakhlak mulia, sadar hukum, dan lain-lain. Salah satu wujud sikap menjunjung tinggi hak-hak manusia adalah menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dalam UUD 1945 antara lain terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia Kesamaan itu, antara lain, dalam lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta pendidikan. Pasal-pasal itu adalah sbb.: (1) Pasal 27 ayat (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*, (2) Pasal 31 ayat (1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*. Konsep hak asasi manusia juga menekankan masalah keadilan *gender*. Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan tahun 1984, dua tahun setelah perang dunia kedua, juga menekankan kesetaraan jenis kelamin (Engineer, 2002: 3).

Sementara itu, dalam masyarakat sering terjadi ketidakadilan *gender*. Indikator ketidakadilan *gender* terlihat pada: (1) pembagian peran berdasarkan jenis kelamin tidak berdasarkan keahlian, (2) adanya anggapan rendah pekerjaan domestik, (3) adanya anggapan ringan terhadap pekerjaan domestik, (4) pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab isteri, dan (5) isteri berdosa jika tidak menyelesaikan pekerjaan domestik (Khilmiyah, 2000). Ketidakadilan *gender* di antaranya menyebabkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Fakta menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan sebagian besar (69,24-74 %) adalah suami korban (Kalibonso, 2002). Yang lebih menyedihkan lagi, perempuan yang menjadi korban kekerasan itu juga sering dipojokkan (Hayati, 2002). Hal ini disebabkan pelaku dan korban kekerasan mempunyai hubungan kekeluargaan. Kekerasan itu merupakan urusan pribadi, bukan urusan publik dan tidak memerlukan hak azasi manusia di dalamnya (Kalibonso, 2002).

Ketidakadilan *gender* ini tidak hanya disosialisasikan melalui tradisi, tetapi juga disosialisasikan melalui pendidikan (Muthaliin, 2001; Sastriyani, 2001), institusi-institusi pemerintah dan swasta, dan agama (Alimi, 2002; Fakhri, 1999).

Ketidakadilan *gender* dalam pendidikan terjadi di antaranya pada ketidak-samaan kesempatan dalam pendidikan. Hal ini sebenarnya dimulai dari adanya ketidakadilan *gender* dalam masyarakat dan adanya sosialisasi perbedaan *gender* yang menyebabkan ketidakadilan. Perempuan yang dianggap sebagai subordinasi dan mendapatkan posisi yang marginal juga merupakan akibat dari pendidikan. Jika dalam suatu keluarga tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai anak-anaknya, yang disekolahkan adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Akibatnya, pendidikan perempuan jadi terbelakang yang pada gilirannya perempuan tidak bisa meraih posisi penting dalam masyarakat. Jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan makin tinggi tingkat pendidikannya makin kecil. Perbandingan angka masuk pendidikan antara perempuan dan laki-laki dalam sepuluh tahun terakhir adalah sebagai berikut: untuk SD 49, 18 %: 50,8 %, untuk SLTP 46, 34 %: 53, 56 %, untuk SLTA 41, 45 %: 58, 57 %, dan untuk perguruan tinggi 33,60 %: 66,40 % (Azkiyah, 2002). Pendidikan sebagai salah satu institusi pemerintah sudah waktunya untuk menegakkan keadilan *gender* dan menghentikan ketidakadilan *gender*.

Muthaliin (2001) dalam penelitiannya mengenai bias *gender* dalam pendidikan di Sekolah Dasar menemukan bahwa sarana sosialisasi adalah GBPP, buku pelajaran, dan interaksi belajar mengajar. Di antara beberapa buku pelajaran yang digunakan di SD, buku yang paling banyak mengandung bias *gender* adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia. Diasumsikan buku Pelajaran dan pembelajaran Bahasa Indonesia di SLTP juga mengandung bias *gender*. Dari pengamatan peneliti ditemukan bahwa buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk SLTP cukup banyak mengandung bias *gender*. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan pada penyusunan model

pengembangan materi ajar dan pembelajaran bahasa Indonesia yang berperspektif kesetaraan *gender*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun I menunjukkan betapa kentalnya bias *gender* yang terjadi pada pembelajaran di SLTP, khususnya pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bias *gender* terdapat pada perangkat pembelajaran, proses belajar-mengajar, buku pelajaran dan pada evaluasi pembelajaran BI. Pada proses belajar-mengajar, buku pelajaran, dan evaluasi pembelajaran BI bias *gender* itu sangat banyak. Pada buku pelajaran BI ditemukan bias *gender* pada bacaan, pada latihan, dan pada gambar. Pada proses pembelajaran bias *gender* juga sangat banyak. Bias dalam wujud perilaku guru, perilaku siswa, dan dalam materi pembelajaran. Jika materinya pokoknya, yakni buku pelajaran banyak mengandung bias *gender* dapat dipastikan pada proses pembelajaran kandungan bias *gender* itu lebih banyak (Markhamah, dkk. 2003).

Bias *gender* yang dilakukan dalam komponen pembelajarannya itu ada beberapa bentuk. Bentuk bias *gender* yang paling banyak ditemukan adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan. Namun, selain itu ditemukan bias *gender* dalam bentuk subordinasi perempuan, stereotipe, kekerasan terhadap perempuan dan marginalisasi. Sikap dan perilaku guru sangat mendukung terhadap bias *gender*. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan yang berbeda terhadap siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, salah satu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tahun kedua adalah bagaimana persepsi guru bahasa dan sastra Indonesia dan kepala sekolah terhadap model materi ajar dan model pembelajaran yang dikembangkan.

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi guru bahasa Indonesia dan kepala sekolah terhadap model materi ajar dan model pembelajaran yang berperspektif kesetaraan *gender*.

Hasil penelitian tahun I yang sudah dicapai adalah sebagai berikut. *Pertama*, bias *gender* pada buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SLTP mengandung bias *gender*. Bias *gender* terdapat pada komponen bacaan, latihan, dan gambar. *Kedua*, bentuk bias *gender* pada buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang paling banyak adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan. *Ketiga*, bias *gender* juga ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran di SLTP. *Keempat*, dari jawaban terhadap angket yang diberikan diketahui bahwa pada umumnya pengetahuan guru Bahasa Indonesia terhadap kesetaraan *gender* cukup baik dan keyakinan mereka terhadap kesetaraan *gender* tergolong tinggi. *Kelima*, dari hasil analisis pengetahuan kepala sekolah terhadap kesetaraan *gender* dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengetahuan kepala sekolah SLTP di Solo tentang kesetaraan *gender* relatif masih kurang.

Gender (diindonesiakan dari *gender*) adalah suatu istilah konsep yang tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. *Gender* adalah seperangkat peran yang diperuntuk untuk laki-laki dan perempuan yang disosialisasikan melalui proses sosial budaya. *Gender* adalah atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Hal itu berkaitan dengan harapan dan pikiran masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan (Alimi, 2002). *Gender* adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kasar, kuat, perkasa, dan jantan (Fakih, 1999). *Gender* seperangkat peran yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Mosse, 1996)

Ayat-ayat Quran yang sering dipakai sebagai dalil untuk memarginalisasikan perempuan adalah ayat-ayat Quran yang berisi hal-hal berikut: (1) laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan laki-laki boleh memukul untuk memberi pelajaran dalam hal *nusyuz* (*domestic violence*) walau sebagai pilihan terakhir (*An-Nisa* (4:34), (2) persaksian perempuan setengah harga dari persaksian laki-laki (*Al Baqarah* (2:282), (3) laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan (*Al Baqarah* (2:228), (4) perempuan mendapat setengah dari bagian yang didapat laki-laki (*An Nisa* (4:11), (5) bolehnya poligami (*An Nisa* (4:3).

Dibolehkannya poligami di dalam Islam sebenarnya adalah untuk mengatasi persoalan anak yatim. Kebolehan poligami itu pun juga harus memenuhi persyaratan yang secara realistis sulit untuk diwujudkan. Perasyaratan yang dimaksud adalah: (1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan kehidupan keseharian isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan suami mampu berbuat adil terhadap anak-anak dan isteri-isterinya (Suryadilaga, 2002). Persyaratan adil menjadi persyaratan yang utama dalam poligami. Seperti dituliskan Engineer (2002) *But if you cannot maintain justice between the wives, then follow the principle of monogamy*. Kebolehan berpoligami bukan karena seks, melainkan untuk menolong janda (Nasution, 2002). Kebolehan poligami dalam Islam sebenarnya merupakan revolusi positif. Artinya, yang semula dalam masyarakat Arab jahiliyah (sebelum Islam) seorang laki-laki boleh mengawini perempuan berapa saja tanpa batas, dengan turunnya *An Nisa* ayat 3, berarti ada pembatasan dan penghargaan terhadap perempuan.

Ketidakadilan *gender* dalam masyarakat terlihat pada pembuatan seterotipe dan label negatif bagi perempuan. Stereotipe pasif, submisif dan inferior dan irasional diberikan pada perempuan, sementara aktif, superior dan rasional diberikan kepada laki-laki. Stereotipe itu bukanlah sesuatu yang *given* dan final. Hal itu merupakan hasil konstruksi suatu budaya yang disosialisasikan dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Perbedaan itu bukan kodrati (Rojab, 2002).

Ketidakadilan *gender* tidak hanya terjadi di dalam agama, tetapi juga di dalam pendidikan dan dalam masyarakat. Ketidakadilan *gender* dalam pendidikan terjadi di antaranya pada ketidaksamaan kesempatan dalam pendidikan. Akibatnya, pendidikan perempuan jadi terbelakang yang pada gilirannya perempuan tidak bisa meraih posisi penting dalam masyarakat. Jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin kecil. Perbandingan angka masuk pendidikan antara perempuan dan laki-laki dalam sepuluh tahun terakhir adalah sebagai berikut: untuk SD 49, 18 %: 50,8 %, untuk SLTP 46, 34 %: 53, 56 %, untuk SLTA 41, 45 %: 58, 57 %, dan untuk perguruan tinggi 33,60 %: 66,40 % (Azkiyah, 2002).

Yang mengandung ketidakadilan *gender* tidak hanya terjadi pada pendidikan formal, tetapi juga pada pendidikan nonformal atau pendidikan dalam keluarga. Dalam lingkungan keluarga anak perempuan mendapat pola asuh yang berbeda dengan laki-laki. Adanya kodrat bahwa perempuan itu mengandung dan menyusui menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa ada peran yang melekat pada perempuan, yaitu hanya berperan dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan mengalami kendala untuk mendapat hak-hak dan kesempatannya (Sastriyani, 2001; Markhamah, 2002). Perempuan menjadi subordinasi bahkan cenderung tertindas, teraniaya, dan terhina (Dardjowidjojo, 2002; Pratiwi, 1995).

Dalam lingkungan keluarga yang masih mengalami bias *gender* terdapat pandangan bahwa suatu keluarga harus mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan dapat melahirkan sehingga meneruskan keturunan, sedangkan anak laki-laki pemberi garis keturunan yang menjadi kebanggaan orang tua. Karena itulah anak laki-laki sering dinomorsatukan, diharapkan memiliki karier yang baik sehingga dapat mengangkat derajat keluarga. Harapan itu menyebabkan anak laki-laki dituntut belajar yang lebih keras agar cita-citanya tercapai. Anak laki-laki tidak dididik untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Dardjowidjojo, 2002; Sastriyani, 2001). Laki-laki bisa bekerja ke luar rumah mengisi pabrik-pabrik serta bagian produksi (Markhamah, 2002; Mahmudah, 2001).

Selain itu, berberapa kajian telah dilakukan berkaitan dengan gender dalam Quran atau dalam Islam. Kajian-kajian yang dimaksud di antaranya dilakukan oleh Umar (2001), Aziz (2002), Faisal (2002), Engineer (2002), Chusniyatun dan Markhamah (2003), dan Maslamah (lebih lanjut Lihat Markhamah dkk., 2003).

Engineer (2003:1-2) menyatakan bahwa setelah perang dunia kedua secara alami semakin banyak perempuan yang bekerja. Perempuan dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga dan mulai dipekerjakan di luar rumah. Dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, perempuan jadi semakin terbuka wawasannya. Mereka juga kurang tergantung kepada laki-laki dan lebih mandiri. Perempuan yang berpendidikan juga semakin bertambah. Dengan demikian, semakin bertambah pula kesempatan perempuan untuk mengisi lapangan pekerjaan. Kemajuan

yang dicapai oleh perempuan juga telah diteliti oleh Ratnawati, dkk. (1999: 36-43), yakni dengan meneliti anggota DPRD perempuan Yogyakarta. Namun, masih ada sebagian perempuan yang mempertahankan larangan bagi perempuan untuk maju. Mereka ini memandang bahwa laki-laki tidak menyukai perempuan yang kuat. Perempuan yang mengambil alih tugas laki-laki dirasuki sifat maskulin yang menentang laki-laki. Laki-laki lebih suka perempuan menjadi lemah (Harder, 1999: 37).

Perbedaan peran perempuan dan laki-laki sektor pertanian, khususnya petani salak telah diteliti oleh Harsoyo, dkk. (1999: 44-57). Di sisi lain kemajuan perempuan juga dilaporkan oleh Widaningroem, dkk. . (1999: 15- 29). Meskipun perempuan mengerjakan pekerjaan dalam perdagangan, mereka tetap memenuhi tanggung jawabnya di sektor domestik. Hal ini tidak terjadi pada pedagang ikan laki-laki.

Hasil penelitian Muthaliin (2001: 103-111), khususnya mengenai buku pelajaran menyatakan bahwa materi pembelajaran, baik buku paket terbitan Depdiknas maupun buku-buku terbitan lain mengandung banyak konsep bias *gender*. Bias itu termanifestasikan dalam rumusan dan gambar suasana, kegiatan, aktivitas, penggambaran, profesi, peran, permainan, pemilihan, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki atau dibebankan pada masing-masing jenis kelamin.

Hasil penelitian yang tidak jauh berbeda adalah hasil penelitian bahan ajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sugiarti (2003:1) melaporkan beberapa hasil penelitian, di antaranya yang dilakukan oleh Yustina Rositawati dan Ari Fediati et al. Tim penelitian yang dilaporkan seringkali disebutnya dengan tim Surabaya dan Tim Jakarta. Banyak bahan ajar untuk Sekolah Dasar yang memperkuat dan melestarikan stereotipe *gender*.

Secara keseluruhan hasil penelitian Sugiarti (2003a: 4) yang dilakukan pada buku teks PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS, kelas 1 - 6 Kurikulum 1994 yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hasilnya sebagai berikut.

Tabel 1: Bias *Gender* pada Buku Sekolah Dasar

Mata pelajaran	Stereotype		Tidak stereotype	
	F	%	F	%
PPKN	89	94,68	5	5,32
IPS	16	88,9%	2	11,1
Bahasa Indonesia	83	92,22	7	7,78

Sumber: Sugiarti (2001: 4).

Penelitian tentang bias *gender* dalam buku, sebelumnya telah dilakukan oleh Astuti dkk. (1999: 1-14) yang diterbitkan dalam *Jurnal Gender*. Cakupan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthaliin (2001), dan Sugiarti (2003). Perbedaannya terletak pada jenjang pendidikannya. Penelitian Astuti dkk. meliputi jenjang SD, SLTP, dan SMU masing-masing untuk semua kelas.

Pemunculan peran *gender* dalam buku Bahasa Indonesia Tingkat SLTP dinyatakan di bawah ini.

Tabel 2: Frekuensi Pemunculan Peran *Gender* dalam Buku Bahasa Indonesia Tingkat SLTP

Macam peran/aktivitas	Frekuensi pemunculan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & perempuan
Peran domestik	19	19	1
Peran publik	4	2	-
Peran sosial & keagamaan	7	2	8
Pendidikan	7	4	5
Rekreasi	3	4	5
Pengambilan keputusan	-	-	-

Sumber: Astuti (1999: 10)

Tabel 3 Frekuensi Pemunculan Peran *Gender* dalam Buku Bahasa Indonesia Tingkat SMU

Macam peran/aktivitas	Frekuensi pemunculan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & perempuan
Peran domestik	16	25	5
Peran publik	180	23	4
Peran sosial keagamaan	29	9	13
Pendidikan	20	7	6
Rekreasi	10	7	1
Pengambilan keputusan	33	2	2

Sumber: Astuti (1999: 12)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah No. 042/C/I/Kep./79 (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 3) buku yang dipakai di sekolah digolongkan dalam lima jenis, yaitu: buku teks utama, buku teks pelengkap, buku bacaan kepustakaan, buku sumber, dan buku bacaan lain.

Menurut Patrick buku pelajaran merupakan media instruksional yang dominan di kelas dan bagian sentral dalam suatu sistem pendidikan, karena buku adalah alat yang penting untuk menyampaikan materi kurikulum. Oleh karena itu, buku sekolah menduduki peranan sentral pada semua tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (1997) menunjukkan bahwa kepemilikan buku berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh World Bank tahun 1989, yakni bahwa tingkat kepemilikan siswa terhadap buku dan fasilitas sekolah berkorelasi dengan prestasi belajarnya (Supriyadi, 2001).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *gender*. Pendekatan atau paradigma Gender dalam Pembangunan (*Gender and Development* atau GAD) merupakan paradigma alternatif dalam memecahkan masalah ketidakadilan dan kemiskinan di negara-negara berkembang di samping paradigma feminis. *Gender* adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Seperangkat peran ini menyangkut penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab, keluarga dan lain-lain. Hal itu akan memoles peran *gender* manusia. Manusia mulai mempelajari peran *gender* itu sejak lahir. Peran *gender* itu akan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga dipengaruhi oleh kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis (Moose, 1996).

Gender adalah konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Adapun bias *gender* adalah kesenjangan peran dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan dan masyarakat. (Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, 2003:1; Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas, 2003: 1). *Gender* berbeda dengan seks. *Gender* adalah buatan manusia, bersifat dinamis, peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, tidak universal, dipengaruhi oleh budaya, dan terkonstruksi sejak lahir. Sementara itu, seks merupakan anugerah tuhan, tidak bisa dipertukarkan fungsinya, universal, ciri biologis, dan tidak bisa diubah. Peran *gender* adalah peran laki-laki dan perempuan yang dikaitkan dengan status, lingkungan, dan budaya (Tim Diknas, 2003: 2-3).

Pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan *gender* diawali dengan perencanaan yang responsif *gender*. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan kesenjangan *gender* yang terjadi di berbagai bidang pembangunan, baik itu berada pada tataran kebijakan, peraturan perundang-

undangan, program, proyek, maupun kegiatan (Tim Diknas, 2003: 1). Fenomena yang terjadi selama ini peran *gender* itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan *gender* atau ketidakadilan *gender*. Ketidakadilan *gender* itu dapat terlihat pada marginalisasi perempuan, *stereotip* atas pekerjaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja lebih pada perempuan (Handayani dan Sugiarti, 2002: 15-19).

Manusia merupakan makhluk yang berjiwa, dan kehidupan kejiwaan itu direfleksikan dalam tingkah laku atau aktivitas manusia, seperti merasa senang, berpikir, berkeinginan, dsb. Menurut Tetens dan Kant jiwa manusia dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu: (a) kognisi yang berhubungan dengan pengenalan, (b) emosi yang berhubungan dengan perasaan, dan (c) konasi yang berhubungan dengan motif (dalam Walgito, 2002:69). Selanjutnya, Morgan dkk. serta Woodworth dan Marquis menjelaskan bahwa aktivitas kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir, dan *problem solving* (dalam Walgito, 2002 : 69).

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percepere* yang artinya menerima atau mengambil. Leavitt membedakan persepsi menjadi dua macam, yaitu persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (dalam Sobur, 2003: 445). Sedangkan Yusuf menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan (1991: 108).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat panca indera. Dalam hal ini, Branca, Woodworth dan Marquis mengatakan bahwa indera merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya (dalam Walgito, 2002: 69). Selanjutnya, Walgito (2002: 70) menyatakan bahwa persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Oleh karena itu, apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam persepsi dapat dikemukakan bahwa perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman-pengalaman individu tidak sama. Oleh karena itu, dalam mempersepsi stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.

Rakhmat (2001 : 64) menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensori stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Desiderato, dalam Rakhmat, 2001 : 64).

Robbins (2001:88) menyebutkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera

mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Apa yang dipersepsikan orang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas itu, bukan mengenai realitas itu sendiri.

Yang dimaksud persepsi pada penelitian ini adalah bagaimana seseorang memandang, mengartikan, menafsirkan kesan-kesan, tanggapan subjektif, atau membuat tanggapan terhadap suatu objek. Yang dimaksud seseorang di sini ialah kepala SMP Negeri maupun Swasta, Kepala Subdinas Pendidikan Menengah, dan para pengawas pendidikan SMP di kota Surakarta (yang dalam penelitian ini disebut pengambil kebijakan), dan guru.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu, menurut Robbins (2001: 92) ada tiga, yakni: faktor pada pemersepsi, faktor dalam situasi, dan faktor pada target. Ketika orang melihat pada sasaran dan berusaha menafsirkan apa yang ia lihat, maka penafsiran itu akan sangat dipengaruhi karakteristik dari orang tersebut. Adapun karakteristik dari individu yang mempengaruhi persepsi antara lain : sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan (Robbins, 2001 : 89).

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui angket dan observasi. Angket untuk menggali data persepsi guru dan pengambil kebijakan terhadap model yang dikembangkan. Sumber data adalah guru dan pengambil kebijakan. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan seluruh data yang bersifat kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pengambil Kebijakan terhadap Model yang Dikembangkan

Kajian tentang persepsi pengambil kebijakan terhadap model materi ajar dan pembelajaran yang berperspektif kesetaraan *gender* dalam penelitian ini didasarkan pada teori Robbins (2001). Berdasarkan teori tersebut, persepsi adalah proses kognitif yang dilakukan oleh seseorang untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami dunia sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi: (1) individu yang merasakan (sikap, alasan, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan), (2) sasaran (sifat dari objek yang diobservasi), dan (3) situasi (unsur-unsur yang ada di sekitar lingkungan).

Persepsi pengambil kebijakan terhadap model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* (yang selanjutnya disebut model ini), dalam penelitian ini digali melalui dua puluh enam butir pernyataan. Dari jawaban terhadap

angket yang diberikan diketahui bahwa pada umumnya persepsi pengambil kebijakan terhadap model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* positif.

Mayoritas responden (81,2 %) menyatakan setuju - bahkan sangat setuju - bahwa model ini perlu disusun karena materi ajar yang ada di sekolah-sekolah masih mengandung ketidakadilan *gender*. Sementara itu, 18,8 % responden menyatakan ketidaksetujuannya.

Agak berbeda dengan kesetujuan yang berkaitan dengan bias dalam materi ajar, mayoritas para pengambil kebijakan (96,9 %) menyatakan setuju terhadap model ini karena proses belajar mengajar di sekolah-sekolah masih mengandung bias *gender*. Sebesar 3,1 % saja dari responden yang menyatakan tidak setuju.

Bias *gender* tidak hanya terdapat dalam buku pelajaran dan proses belajar mengajar, tetapi juga masih banyak terjadi di masyarakat. Berkenaan dengan ini, 96,9 % responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap model ini. Mayoritas responden (96,9 %) juga setuju terhadap model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* karena model ini juga sesuai dengan tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Model ini disusun berdasarkan tuntutan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, dan materi pokok yang telah ditentukan oleh Kurikulum 2004. Namun demikian, tetap ada yang menyatakan ketidaksetujuannya (3,1 %). Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang meratanya sosialisasi terhadap KBK dan beberapa sekolah memang belum mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Semua pengambil kebijakan di bidang pendidikan menyatakan bahwa model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* ini termasuk model yang inovatif. Sebanyak 81,3 % responden menyatakan setuju dan sisanya (18,7 %) menyatakan sangat setuju terhadap keinovatifan model ini.

Selain inovatif, model ini dinilai sederhana dan mudah dipahami. Terhadap pernyataan ini, 6,2 % responden menyatakan sangat setuju, 78,1 % menyatakan setuju, dan hanya 15,6 % menyatakan tidak setuju. Tanggapan terhadap aspek ini hampir sama dengan tanggapan terhadap kejelasan model.

Mayoritas responden (9,8 % menyatakan sangat setuju, 78,1 % menyatakan setuju, dan 12,5 % menyatakan tidak setuju) menilai bahwa model ini mudah diaplikasikan.

Sesuai dengan penilaian mereka bahwa model ini sederhana dan jelas (mudah dipahami), sebagian besar responden (84,4 %) menyatakan merasa tertantang untuk melaksanakan model ini. Hanya 15,6 % responden yang menyatakan tidak tertantang untuk melaksanakannya. Lebih dari itu, mayoritas responden (96,9 %) menyatakan perlunya model baru ini lebih dikembangkan. Tanggapan setuju terhadap pernyataan

ini dikemukakan oleh 87,5 % dan tanggapan sangat setuju dikemukakan oleh 9,8 % responden.

Tidak saja merasa tertantang, seluruh responden (90,6 % menyatakan setuju dan 9,4 % menyatakan sangat setuju) menilai bahwa model ini perlu diimplementasikan. Bahkan, dinyatakan (87,5 menyatakan setuju dan 12,5 menyatakan sangat setuju) bahwa model ini akan diterapkan di sekolah mereka. Hal ini berarti bahwa seluruh pengambil kebijakan tertarik menerapkan model ini. Mereka pun menyatakan mendukung terhadap penggunaan model ini oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia.

Ketertarikan kepala sekolah dan pengambil kebijakan dalam menggunakan model ini serta pemberian dukungan kepada guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang menerapkan model ini karena mereka menilai bahwa penggunaan model ini bertepatan waktunya dengan usaha pemerintah dalam menyetarakan laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan pernyataan ini, mayoritas responden (80,6 %) menyatakan kesetujuan mereka dan hanya 9,4 % responden yang menyatakan tidak setuju.

Pada umumnya para pengambil kebijakan menilai bahwa model ini tepat digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM). Terhadap pernyataan ini, 12,5 % menyatakan sangat setuju, 84,4 % menyatakan setuju, dan 3,1 % menyatakan tidak setuju. Model ini pun dinilai tepat oleh mayoritas responden (84,4 %) dalam pemberian tugas di rumah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pembentukan kompetensi siswa tidak cukup kalau hanya dilakukan di sekolah.

Dengan diterapkannya model ini di sekolah, seluruh responden setuju bahwa guru dan siswa akan mengetahui dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan keadilan *gender*. Tanggapan setuju dikemukakan oleh 81,3 % responden; sedangkan sisanya (18,7 %) menyatakan sangat setuju.

Penerapan model ini, menurut mayoritas responden (96,9 %), akan memotivasi guru dan siswa untuk mengembangkan sikap berkeadilan *gender*. Bahkan, lebih dari itu, model ini -oleh mayoritas responden (93,7 %)- diyakini dapat mendorong guru membudayakan kesetaraan *gender* pada diri peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan mereka bahwa sikap berkeadilan *gender* sangat penting dimiliki oleh para siswa.

Selain berbagai tanggapan yang telah disampaikan di atas, para pengambil kebijakan (yang jumlahnya 96,9 %) juga menyatakan perasaan senang mereka jika sekolah dapat menggunakan model ini. Hanya 3,1 % yang menyatakan tidak setuju atau tidak senang. Ditegaskan oleh mereka (96,9 % responden) bahwa model ini penting diterapkan di sekolah.

Mayoritas responden (84,3 %) menyatakan kesetujuan mereka bahwa dengan penerapan model ini diharapkan terjadi pembudayaan kesetaraan *gender* di sekolah.

Hal ini dapat diwujudkan jika guru dan siswa mendukung upaya pembudayaan keadilan tersebut. Tanggapan ini dikemukakan oleh 84,3 % responden (62,5 % menyatakan setuju dan 21,8 % menyatakan sangat setuju).

Sesuai dengan berbagai tanggapan positif tentang berbagai aspek yang telah dikemukakan di atas, mayoritas kepala sekolah dan pengambil kebijakan (96,9 %) menyatakan bahwa model materi ajar dan pembelajaran bahasa dan Sastra Indonesia berperspektif kesetaraan *gender* ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Mereka (96,9 % responden) yakin model materi ajar dan pembelajaran tersebut berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan *gender*.

Persepsi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap Model yang Dikembangkan

Persepsi guru Bahasa dan Sastra Indonesia (selanjutnya disebut guru Bahasa Indonesia) terhadap model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* dalam penelitian ini digali melalui dua puluh butir pernyataan. Dari jawaban terhadap angket yang diberikan diketahui bahwa pada umumnya persepsi guru Bahasa Indonesia terhadap model materi ajar dan pembelajaran berperspektif kesetaraan *gender* positif. Temuan rinci terhadap berbagai aspek yang terkait dengan persepsi guru terhadap Model Materi Ajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut diuraikan berikut ini.

Sebagian besar guru (36,7 % menyatakan sangat setuju dan 53,3 % menyatakan setuju) yakin bahwa model materi ajar dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap positif siswa terhadap keadilan *gender*. Hanya 10 % guru yang menyatakan kekurangyakinannya.

Keyakinan tersebut sejalan dengan pernyataan guru tentang kebanggaan mereka terhadap penggunaan model ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau sekolah (16,7 % menyatakan sangat setuju, 63,3 % menyatakan setuju, dan 20 % menyatakan tidak setuju).

Meskipun 10 % guru tidak yakin bahwa model ini dapat berpengaruh terhadap sikap siswa pada kesetaraan *gender*, ternyata tidak ada satu pun (0 %) guru yang tidak mendukung penggunaan model materi ajar dan model pembelajaran ini. Sebanyak 16,7 % guru menyatakan sangat setuju dan sisanya (83,3 %) menyatakan setuju. Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa guru-guru berharap kelak model ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas.

Sejalan dengan dukungan tersebut, sebanyak 96,7 % guru menyatakan kesetujuannya bahwa penggunaan model ini diharapkan agar terbentuk pembudayaan

kesetaraan *gender* di lingkungan sekolah dan 3,3, % saja yang menyatakan ketidaksetujuannya. Tanggapan yang sama (96,7 % menyatakan setuju atau sangat setuju) ditunjukkan oleh guru bahwa dengan penggunaan model ini diharapkan agar SDM sekolah (khususnya guru) mendukung budaya berkeadilan *gender*. Melihat banyaknya guru yang berharap agar melalui penggunaan model ini dapat terbentuk pembudayaan kesetaraan *gender* dan keadilan *gender*, sangatlah wajar jika 86,6% dari guru menyatakan bahwa model ini penting untuk diterapkan di sekolah.

Terhadap pentingnya penggunaan model ini, menurut sebagian besar guru (56,7%), model ini belum pernah digunakan di sekolah. Namun demikian, perlu pula dikemukakan bahwa 43,3 % menyatakan ketidaksetujuan mereka bahwa model ini belum pernah digunakan di sekolah.

Mayoritas guru memandang bahwa penerapan model ini memiliki banyak manfaat. Sebanyak 96,6 % menyatakan setuju (tepatnya 53,3 % menyatakan setuju dan 43,3 % menyatakan sangat setuju) bahwa dengan penerapan model ini, guru akan dapat berperan menegakkan keadilan *gender*. Dengan distribusi yang berbeda, mayoritas guru (96,6%) menyatakan bahwa dengan penerapan model ini siswa akan termotivasi untuk mengembangkan keadilan *gender*. Dari angka tersebut dapat dikemukakan bahwa 70 % menyatakan setuju dan 26,7 lainnya menyatakan sangat setuju.

Mayoritas guru (83,3 %) menyatakan kesetujuannya bahwa penerapan model ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyetarakan laki-laki dan perempuan. Model ini, menurut (90 %) guru, juga sesuai dengan Kurikulum 2004. Materi ajar dikembangkan untuk memfasilitasi guru dan siswa agar melalui kegiatan belajar mengajar dapat diwujudkan kompetensi peserta didik. Hanya sebagian kecil guru (10 %) yang menyatakan ketidaksetujuannya. Ketidaksetujuan ini terutama disebabkan guru-guru tersebut belum memiliki pemahaman tentang Kurikulum 2004 itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa belum semua sekolah di Surakarta melaksanakan Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kmpetensi) tersebut.

Berkenaan dengan tanggapan guru mengenai penerapan model ini jika dikaitkan dengan proporsi siswa laki-laki dan perempuan di kelas, mayoritas guru (92,3 %) menyatakan kesetujuan mereka bahwa model ini perlu diterapkan meskipun jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan relatif sama. Hal ini terkait dengan persepsi mayoritas guru (90 %) bahwa idealisme siswa mulai berkembang dalam memperjuangkan keadilan *gender*. Para siswa mulai menyadari hak-haknya.

Bagi sebagian besar guru (80 %), model ini merupakan model yang baru dan menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak serta-merta memandang penting diterapkannya model ini secara serentak di SMP. Meskipun demikian, mayoritas guru (70 %) tetap berpendapat bahwa penerapan model ini secara serentak akan lebih baik.

Hal yang menggembarakan adalah komitmen guru dalam penerapan model ini. Sebagian besar guru (70 %) menyatakan setuju bahwa model ini hendaknya diterapkan secara bersungguh-sungguh; bahkan (30 %) lainnya menyatakan sangat setuju.

Tanggapan guru tentang penerapan model ini secara sungguh-sungguh tersebut ternyata sejalan dengan keyakinan mereka bahwa model ini merupakan upaya untuk membangun keadilan *gender*. Terhadap pandangan terakhir ini, 30 % guru menyatakan sangat setuju dan 70 % lainnya menyatakan setuju. Dengan perkataan lain, tidak ada satu pun guru yang menyangsikan manfaat penerapan model ini dalam rangka membangun kehidupan yang berkeadilan *gender*.

SIMPULAN

Pertama, model materi ajar dan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berperspektif kesetaraan *gender* dalam penelitian ini adalah model materi ajar yang dibuat dengan mendasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi dan memperhatikan keseimbangan peran, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki. Materi itu disusun dengan prinsip-prinsip penyusunan buku ajar yang berperspektif kesetaraan *gender*

Kedua, persepsi pengambil kebijakan terhadap model yang dikembangkan sebagian besar positif. Artinya, model materi ajar dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berperspektif kesetaraan *gender* itu diperlukan, inovatif, sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, sesuai dengan program pemerintah, jelas, sederhana, mudah diaplikasikan, dan merupakan model yang menantang. Kepositifan persepsi itu juga ditandai dengan persetujuan pengambil kebijakan bahwa model itu menarik dan tepat. Model itu dinilai dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang berkeadilan *gender* karena pengetahuan guru dan siswa yang meningkat terhadap kesetaraan *gender* yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkannya di dalam masyarakat.

Ketiga, persepsi guru terhadap model materi ajar dan pembelajaran yang dikembangkan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan persepsi kepala sekolah. Artinya, guru pun memiliki persepsi yang positif terhadap model yang dikembangkan. Semua guru mendukung terhadap penggunaan model yang dikembangkan. Walaupun secara umum persepsi guru positif, namun secara kuantitatif tiap-tiap butir pernyataan persentasenya sedikit ada perbedaan antara kepala sekolah dengan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh Yasir. 2002. *Jenis Kelamin Tuhan*. Yogyakarta: LKIS.
- Astuti, Mary, Aisah Indati, dan Siti Harti Sastriyani. 1999. "Bias Gender dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia". Dalam *Jurnal Gender*. Vol. 1, No. 1, Juli.
- Aziz, Erwati. 2002. "Isteri dalam Perspektif Al Quran". Dalam *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta Press.
- Azkiyah, Nurul. 2002. "Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan dan Dunia Pembangunan". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 23. Mei. Hal. 7-17
- Chusniyatun dan Markhamah. 2003. *Gender dalam Terjemahan Ayat-ayat Quran tentang Laki-laki dan Perempuan*. Surakarta: Laporan Penelitian atas Biaya DP3M, Dirjen DIKTI, tahun 2003.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2002. "Nasib Wanita dalam Cerminan Bahasa". Sumijati, As., Suhartono, Marsono, I Dewa Putuwijana (ed.) *Integrasi, Moral Bangsa, dan Perubahan*. Yogyakarta: Devisi Penerbitan, Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Perbukuan. 2003. *Kebijakan Perbukuan Sekolah*.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Perbukuan. 2004. "Kebijakan Perbukuan". Makalah dalam *Sosialisasi Bahan Ajar yang Responsif Gender* di Solo 17-19 Juni 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, Proyek Peningkatan dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Jakarta. 2003. *Pedoman Penulisan Bahan Ajar Berwawasan Gender*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah"
- Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "Materi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang

- Engineer, Asghar Ali. 2002. "Islam And Poligamy". Dalam *Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 1 No. 1 Maret. Hal.27-39.
- Faisal, Abdullah, 2002. "Konsep Wawwam di dalam Alquran (Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna). Dalam *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta.
- Fakih, Mansoer. 1996. "Analisis Gender & Transformasi Sosial". Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- _____.1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Harder, Nelly van Doorn. 1999. "Perempuan di Mesir: Perspektif Budaya dan Agama". Dalam Syafiq Hasyim Menakar "Harga" Perempuan: *Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*.
- Harsoyo, Eni Harmayani, dan Any Suryantini. 1999. "Dampak Pembangunan Pertanian terhadap Marginalisasi Tenaga Kerja Wanita: Kasus Usaha Tani Salak di Kabupaten Sleman". Dalam *Jurnal Gender*. Vol. 1, No. 1, Juli.
- Hayati, Chusnul. 1996. "Perjuangan Wanita Jawa Tengah dalam Pergerakan Nasional 1900-1945". Dalam *Lembaran Sastra* No. 19. hal 45-59.
- Hayati, Elly Nur. 2002. "... Jangan Pojokkan Perempuan Korban Kekerasan". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.
- Kalibonso, Rita Serena. 2002. "Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.
- Khilmiyah. Akif. 2000. "Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Muslim". Dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 2, No.1 Januari.

- Mahmudah. 2001. "Citra Perempuan dalam Media Masa: Upaya Penyetaraan Gender". *Manusia dan Dinamika Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Bigraf Publishing.
- Markhamah. 2002. "Gender dalam Tradisi Selamatan pada Masyarakat Keturunan Cina di Surakarta. Laporan Penelitian yang Dibiayai oleh DP4M, Dirjen Dikti.
- Markhamah, Sudirjo, Sarwiji Suwandi. 2003. "Model Pengembangan Materi Ajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SLTP yang Berperspektif Kesetaraan Gender". *Laporan Akhir Penelitian Tahun Pertama*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maslamah. 2002. "Feminisme dalam Al Quran". Dalam *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta Press.
- Mosse, Yulia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.
- Muthaliin, Achmad. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam". Dalam *Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 1 No. 1 Maret. Hal. 57-87.
- Pratiwi, Restu. 1995. "Wanita pada Masa Tradisional Cina". Dalam *Pergulatan Mencari Jati Diri*. Jakarta: Interfidei bersama Mataklin.
- Rahmad, Jalaludin. 2003. *Psychologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda-karya.
- Ratnawati, Siri Muti'ah Setyawati, dan Bambang Purwoko. 1999. "Profil Politisi Wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta". 1999. Dalam *Jurnal Gender*. Vol. 1, No. 1, Juli.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behaviour*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Rojab, Budi. 2002. "Pendidikan Sekolah dan Perubahan Perempuan". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 23. Mei. Hal. 19-33.

- Sastriyani, Hariti. 2001. "Sosialisasi Pendidikan Berperspektif Gender". Dalam Sumiyati As (ed.) *Manusia dan Dinamika Budaya: Dari Kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM bekerja sama dengan Bigraf.
- Shihab, Quraish. 2003. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an. Volume 2: Surah Ali Imron, Surah An-Nisaa*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiarti. 2003. *Laporan Kegiatan "Workshop Bahan Ajar yang Responsif Gender"*. Malang: Lembaga Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiarti, 2003a. *Identifikasi Hasil Studi Bahan Ajar*. Malang: Lembaga Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Supriyadi, Dedi. 2001. *Anatomi Buku Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Adicita.
- Surono. 1996. "Pasangan Tokoh Pria dan Wanita dalam Novel Agung Sebelum Tahun 1950. Dalam Lembaran Sastra. No. 20. hal. 72-84.
- Suryadilaga, M. Al Fatih. 2002. "Syarat Poligami dalam Islam". Dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 1, No. 1, Maret. Hal 1 - 18.
- Tim Diknas. 2003. "Gender dan Pembangunan". Materi *Workshop Capacity Building Stakeholder Pendidikan*, di Kusuma Sahid 20-22 Oktober.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramida.
- Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta :Andi
- Widaningroem, Retno, Hery Saksono, dan Sri Kanoni. 1999. "Strategi Wanita dalam Mata Rantai Perdagangan Hasil Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta". Dalam *Jurnal Gender*. Vol. 1, No. 1, Juli.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.